



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RENDI SOLIHIN

2. Jabatan : WAKIL BUPATI

3. NHK : 537306

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 12491 m2/3600 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1551 m2/391 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 12180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

4. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 6691 m2/990 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 675.000.000

6. Tanah Seluas 8400 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 520.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MOPEN/JEEP Tahun 2016, LAINNYA Rp. 350.000.000

2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 360.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 597.859.791

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.277.859.791



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.277.859.791

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.